

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi negara, setiap negara terutama di negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih tidak luput dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dapat menimbulkan ketimpangan sosial sehingga menyebabkan beberapa masyarakat tidak dapat memenuhi hak kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan tercipta karena kondisi ketidakberdayaan yang menimbulkan kerentanan dalam menghadapi situasi kehidupan tantangan ini merupakan isu global yang senantiasa menjadi perhatian Pemerintah diberbagai negara. Keadaan ini menciptakan ketergantungan dan keterasingan secara sosial seperti yang disampaikan.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 kabupaten Sleman garis kemiskinan di kabupaten Sleman tercatat RP422,933 per kapita perbulan meningkat menjadi RP250,763 ditahun 2022 kemudian secara signifikan meningkat menjadi RP491.652 data ini menunjukkan bahwa kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat baik dari sisi pangan atau non- pangan. Kenaikan garis kemiskinan ini mencapai 16,2% dalam kurun waktu tiga tahun mengalami dampak serius. Menurut data (BPS,2021-2023)

Kondisi ini dapat menghambat pencapaian Kesejahteraan Sosial dan menuntut Pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu menjangkau kelompok rentan secara efektif untuk menjawab permasalahan tersebut maka pemerintah membuat Database Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Sebagai basis utama dalam menjalankan dan perumusan kebijakan. Perencanaan program perlindungan sosial dan penyaluran bantuan kepada kelompok miskin dan rentan. Yaitu melalui mekanisme verifikasi dan validasi bertahap (Purnawati & Mutia, 2024).

DTKS menjadi alat penting dalam mendistribusikan bantuan kepada kelompok miskin dan rentan miskin ketepatan data dan keakuratan data secara

berkala terhadap DTKS sangat krusial sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan data maka dapat berimplikasi kepada tidak tepatnya pemberian tepatnya sasaran bantuan , data ganda ,sehingga bisa memperburuk kondisi sosial masyarakat penerima DTKS. Meskipun begitu pengelolaan DTKS di Indonesia masih mengalami permasalahan yang kompleks dan krusial. Menurut penelitian (Purnawati & Mutia, 2024) yang berjudul "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang " Hasil nya menjelaskan bahwa pengelolaan DTKS di Provinsi Sumatera barat kecamatan kuranji kota padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial namun dalam implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal hal ini dikarenakan adanya ketidaksinkronan data Nomor Induk Kependudukan, nama dan alamat yang tidak diperbarui secara berkala oleh masyarakat sehingga mempengaruhi pengelolaan data DTKS.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan data kembali dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Ketepatan data diperlukan supaya pemberian sasaran program perlindungan dan bantuan sosial terutama dana pengentasan keluarga miskin dan rentan miskin dapat tercapai. Jika data sudah terverifikasi dan validasi setiap satu tahun sekali mulai dari desa kemudian kelurahan, lalu kecamatan sehingga sasaran utama dalam program bantuan sosial menjadi tepat sasaran. Dampak secara langsung dari ketidaktepatan pengelolaan data DTKS ini yaitu muncul seperti *inclusion error* dan *exclusion error* yaitu bantuan yang diterima oleh pihak yang tidak berhak dan penerima bantuan yang berhak menerima terabaikan, kesalahan sasaran dan penundaan penyaluran berpotensi untuk memperburuk kondisi sosial ekonomi penerima manfaat bantuan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi E-Government Dalam Pengelolaan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Sleman?

1.3. Batasan Masalah

Implementasi E-Government menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di kabupaten sleman, dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi pada pengelolaan data DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Sleman dengan fokus kepada penggunaan dan penerapan e-government sebagai alat optimalisasi pengelolaan data. Aspek teknis pengembangan aplikasi tidak dibahas secara mendalam, demikian pula faktor eksternal di luar dinas sosial yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan data turut diabaikan. Batasan ini diperlukan agar hasil penelitian menjadi fokus, relevan, dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan implementasi e-government dalam pengelolaan DTKS di Kabupaten Sleman.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk menganalisis Implementasi E-Government Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis:

1. Menambah Ilmu Pengetahuan, Khususnya Dalam Bidang Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen, Terkait Implementasi E-Government Dan Pengelolaan Data DTKS.

2. Memberikan Kontribusi Dalam Pengembangan Kerangka Teoritis Tentang Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Tantangan Dalam Implementasi E-Government.

1.5.2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Sleman: Memberikan masukan dan evaluasi terkait implementasi e-government pengelolaan data DTKS , sehingga

dapat menjadi dasar perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

- b. Bagi instansi pemerintah lainnya: Dapat menjadi studi kasus atau referensi bagi instansi lain yang berencana atau sedang mengimplementasikan e-Government dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
- c. Bagi peneliti lain: Memberikan referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik e-Government atau Data terpadu kesejahteraan sosial.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisi teori-teori relevan mengenai implementasi e-Government, pengelolaan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Bantuan sosial serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN: Menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Memaparkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP: Menyajikan kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang relevan.